

# RESPON MASYARAKAT TERHADAP METODE PNPM P2KP : PENGALAMAN MASYARAKAT SADANG SERANG KOTA BANDUNG

Lulut Indrianingrum

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES)  
Gedung E4, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229, Telp. (024) 8508102

---

**Abstract:** *PNPM P2KP (national program of community empowerment – urban poverty alleviation program) has been changing the community's habit in managing the neighbourhood. The method is new, covering many locations of implementation-as national program, limited time of socialization and demanding a real output in short period. These backgrounds lead to a critical question of how does the community response to manage PNPM P2KP within the traditional way of managing the neighbourhood?. This paper aims to describe the community's response to participatory planning (as the spirit of PNPM P2KP) when they are implementing the program's method. The location of study is in Sadang Serang Sub District in Bandung Municipality. Sadang Serang has been participating in this program since 2004. During the project period, the community found a complicated way of implementing the program's method. They have not been acquainted with the participatory method but the program did not give them enough time to understand the program's objective. In the other words, The program that should be participatory-based was implemented in project-based. Time is the keyword of this matter because participatory method will give the community unlimited time to interact with the program. Community's responses were collected from interviews with the community's board (BKM) as the local comitee of PNPM P2KP and community member in Sadang Serang.*

**Keywords:** *Community's response, PNPM P2KP Method*

**Abstrak:** PNPM P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) yang dilaksanakan di Indonesia telah banyak mengubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengelola lingkungannya. Metode yang diterapkan dalam P2KP dianggap baru oleh masyarakat yang meliputi banyak lokasi pelaksanaan sebagai program nasional, waktu sosialisasi yang terbatas dan menuntut keluaran yang nyata pada periode yang singkat (pada program partisipasi). Hal-hal tersebut merupakan fakta yang melatarbelakangi pertanyaan kritis bahwa bagaimana respon masyarakat dalam mengelola program PNPM P2KP ditengah cara-cara konvensional yang biasa dilakukan masyarakat dalam mengelola lingkungannya. Artikel ini bertujuan untuk mendiskripsikan respon masyarakat pada metode perencanaan partisipatif (sebagai inti dari PNPM P2KP) ketika program ini dijalankan. Lokasi studi terletak di Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung. Kelurahan ini telah melaksanakan program P2KP sejak 2004. Selama periode program, masyarakat menemui kesulitan dalam menjalankan metode program yang diterapkan. Masyarakat belum terbiasa dengan metode P2KP namun waktu yang diberikan pada masyarakat belum cukup untuk memahami tujuan program. Dengan kata lain, program yang seharusnya dilaksanakan dengan dasar partisipatif, dilaksanakan dengan dasar proyek. Waktu merupakan kunci dari permasalahan ini karena metode partisipatif akan memberikan waktu yang tidak terbatas bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan program. Respon-respon dari masyarakat dianalisa dari wawancara dengan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai pengelola P2KP dan anggota masyarakat di Sadang Serang.

**Kata kunci :** respon masyarakat, metode PNPM P2KP

## PENDAHULUAN

Menjadi anggota masyarakat pada saat ini tidak dapat disamakan dengan anggota masyarakat pada dua dekade silam. Sejak tahun '80an, masyarakat mulai dikenalkan dengan manajemen pengelolaan lingkungan

yang sama sekali berbeda dengan apa yang sering mereka lakukan. Jika selama ini manajemen kehidupan kemasyarakatan dilakukan dengan pola-pola tradisional (top-down dari pemerintah) yang dianut masyarakat, perkembangan yang terjadi adalah masyarakat

diajarkan untuk menggunakan pola-pola partisipatif.

Pelaksanaan program pembangunan berbasis partisipatif di Indonesia diawali oleh pelaksanaan program Kampung Improvement Program (KIP). Program ini dilaksanakan di Surabaya dan Jakarta pada tahun 1968. Kedua lokasi ini memberikan gambaran yang kontras mengenai hasil pembangunannya. KIP di Surabaya cenderung berlanjut karena menerapkan konsep partisipasi masyarakat (*bottom-up*) sedangkan KIP Jakarta dengan konsep top-down tidak berlanjut (Silas dalam URDI, 2008:28). Adanya proses partisipasi masyarakat dalam KIP Surabaya mendorong program dapat dilanjutkan oleh masyarakat. Pelaksanaan partisipasi yang terus dilanjutkan oleh masyarakat akan menjadi tantangan untuk keberlanjutan program pemerintah berbasis partisipasi.

Dalam perjalanannya, metode partisipatif banyak dilaksanakan melalui program-program pemerintah yang memiliki sub program untuk mengedukasi masyarakat mengenai metode partisipatif.

Salah satu program partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah adalah P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan). Program ini merupakan salah satu program pemerintah yang dimulai tahun 1999 untuk membangun kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Diawali P2KP tahap I tahun 1999-2001, tahap II tahun 2002-2004, tahap III tahun 2005-2007 dan bergabung dengan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dari tahun 2007 sampai sekarang. Capaian PNPM P2KP diperluas dengan tujuan peningkatan IPM

(Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan indeks mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara yang memberikan ukuran gabungan 3 dimensi pembangunan yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli (Pedoman PNPM P2KP, 2008). Salah satu hal yang dibangun dalam program PNPM P2KP adalah kelembagaan masyarakat sebagai representasi masyarakat miskin untuk menyalurkan aspirasinya dan diharapkan dapat menjalankan program secara mandiri dan berkelanjutan. Kelembagaan ini disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Perbedaan mencolok dalam proses pembangunan lingkungan membawa masyarakat pada beberapa permasalahan dalam melaksanakan program tersebut. Ketika pada orde baru masyarakat terbiasa dengan program-program pembangunan yang ditetapkan pemerintah (*top-down*), kali ini masyarakat merupakan tokoh sentral dalam pembangunan di lingkungannya. Oleh karena itu, program partisipatif sudah diajarkan pada masyarakat sejak dua dekade lalu, namun metode ini belum secara signifikan diadopsi dalam pembangunan masyarakat dalam lingkup kecil (kelurahan/desa). Artikel ini akan mengungkapkan bagaimana respon masyarakat terhadap salah satu program partisipatif yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah dan melibatkan dana yang sangat besar yaitu PNPM P2KP.

Terungkapnya respon masyarakat di Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung ini penting untuk keberlanjutan program-program sejenis, sehingga masyarakat akan merasa memiliki dan melanjutkan metode yang diajarkan dikemudian hari.

## PEMBANGUNAN MASYARAKAT DENGAN PEMBERDAYAAN

Partisipasi masyarakat merupakan inti dari keseluruhan konsep pembangunan yang banyak dilakukan oleh pemerintah dan berbagai

lembaga. Terkait dengan perumahan, Turner (1976) berpendapat bahwa partisipasi dalam perumahan terkait dengan siapa yang memutuskan yang dilakukan dan siapa yang menyediakan sumber dayanya.

### SIAPA MENYEDIAKAN (*PROVIDES*) ?

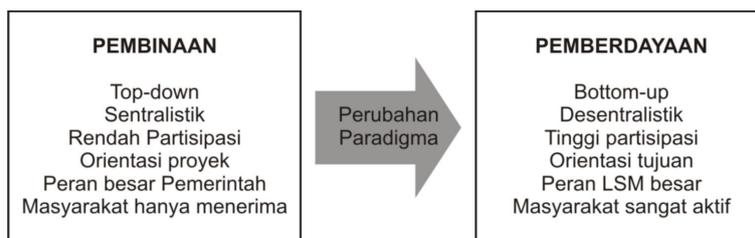
SIAPA MEMUTUSKAN ( <i>DECIDES</i> ) ?	SPONSOR	4. Sponsor memutuskan dan sponsor menyediakan	3. Sponsor memutuskan dan user menyediakan
	USER	1. User memutuskan dan sponsor menyediakan	2. User memutuskan dan user menyediakan

**Gambar 1.** Partisipasi sebagai fungsi dari siapa yang memutuskan apa yang dilakukan dan siapa menyediakan kebutuhannya (Turner, 1976:139).

Dalam program perumahan self-help konvensional dengan sponsor (2) user (masyarakat) menyediakan tenaga kerjanya, pada sebagian besar program self-help, masyarakat adalah yang menyediakan dan memutuskan pelaksanaannya (3). Sedangkan pada sistem demokrasi, sponsor menyediakan apa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat dengan dibatasi oleh ketentuan tertentu (4).

Jika ditelusuri, literatur mengenai pembangunan masyarakat (*community development*) sudah ada sejak tahun '50an

yang berkembang di negara Amerika Serikat setelah Perang Dunia II meskipun pengertian mengenai hal ini belum diidentifikasi secara jelas (Cook, 1994). Meskipun pemahaman pembangunan masyarakat ini sudah ada sejak lama, di Indonesia sendiri konsep pembangunan masyarakat mengalami transformasi yang cukup signifikan. Dalam gambar dibawah ini, usaha pembangunan diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Penjelasan dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



**Gambar 2.** Perubahan paradigma pembangunan masyarakat (Sumber : Bengen, 2001)

Transformasi paradigma diatas bisa dikatakan dilatarbelakangi oleh keterbatasan pemerintah dalam menyediakan pelayanan umum bagi masyarakat, namun di sisi lain, masyarakat makin dilibatkan dalam pembangunan dan melakukan pilihan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu dalam beberapa jangka waktu 10 tahun ini, program

pemberdayaan masyarakat banyak muncul dengan atau tanpa bantuan pihak asing. Jika ada perubahan paradigma, tentu ada pula perubahan dalam cara melakukannya.

Pendekatan yang komprehensif dalam pembangunan masyarakat membutuhkan waktu yang lama karena melibatkan pembangunan aspek non-fisik dari masyarakat

*Peopleandparticipation.net* menyampaikan hal ini, bahwa pembangunan masyarakat merupakan pendekatan jangka panjang untuk membangun komunitas yang aktif dan berkelanjutan berdasarkan keadilan social dan saling menghormati.

## **PEMBERDAYAAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Keterkaitan antara pemberdayaan dan partisipasi dijelaskan oleh Mikkelsen sebagai sesuatu yang saling mempengaruhi. Sebagai sebuah tujuan (partisipasi transformasional), partisipasi menghasilkan pemberdayaan. Tujuan disini adalah tujuan yang dibangun sendiri oleh masyarakat dan berkelanjutan, bukan partisipasi masyarakat dalam proyek yang dilakukan oleh orang luar (partisipasi instrumental) (Mikkelsen, 1999:66).

Peran dari proyek disini adalah suatu sebagai fasilitator yang mendampingi komunitas dan dilengkapi oleh kapasitas yang memadai untuk mendorong, mengorganisir, memberikan pilihan-pilihan (*well informed choices*) yang solutif (Siregar, 2008). Sedangkan keputusan mengenai pilihan tersebut dan alternatifnya diserahkan kepada komunitas karena mereka yang memahami kondisi lingkungan dan kemasyarakatannya.

Dari awal, masyarakat dituntun untuk merubah pola pikir mengenai kemiskinannya. Oleh karena itu masyarakat harus disadarkan terlebih dahulu akar penyebab kemiskinannya dan menyelesaikannya secara bersama dalam satu komunitas, namun hal ini bukan pekerjaan mudah. Proses pembangunan komunitas merupakan pekerjaan yang sulit, memakan waktu dan biaya. Warga terbiasa memikirkan kesehariannya daripada bagaimana masa

depan masyarakat di lingkungannya (Green, 2002:34).

Oleh karena itu P2KP menerapkan konsep pendekatan yang holistic yang mencakup sisi-sisi universal kehidupan. Substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Upaya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan potensi yang terpendam dalam masyarakat. Pengetahuan yang terbatas dari masyarakat mengharuskan adanya fasilitasi dari pihak lain untuk membangun kapasitas produktif masyarakat

## **PROSES PNPM P2KP DI SADANG SERANG**

Pada siklus I tahun 2003, Sadang Serang melaksanakan P2KP sebagai kelurahan baru. Pada tahap ini masyarakat melakukan proses pelaksanaan seperti tertera dalam gambar 3. Proses diawali dengan persiapan masyarakat berupa sosialisasi dan kegiatan refleksi kemiskinan untuk mengidentifikasi masalah kemiskinan di Sadang Serang melalui FGD masyarakat. Masalah kemiskinan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar menentukan program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan dan ditulis dalam PJM pronangkis. PJM ini merupakan acuan pelaksanaan program selama tiga tahun dan direvisi setiap tahunnya. Setelah PJM

tersusun, dana BLM dapat dicairkan dan kegiatan tridaya dapat dilaksanakan setelah KSM terbentuk. Setelah terlaksananya program,

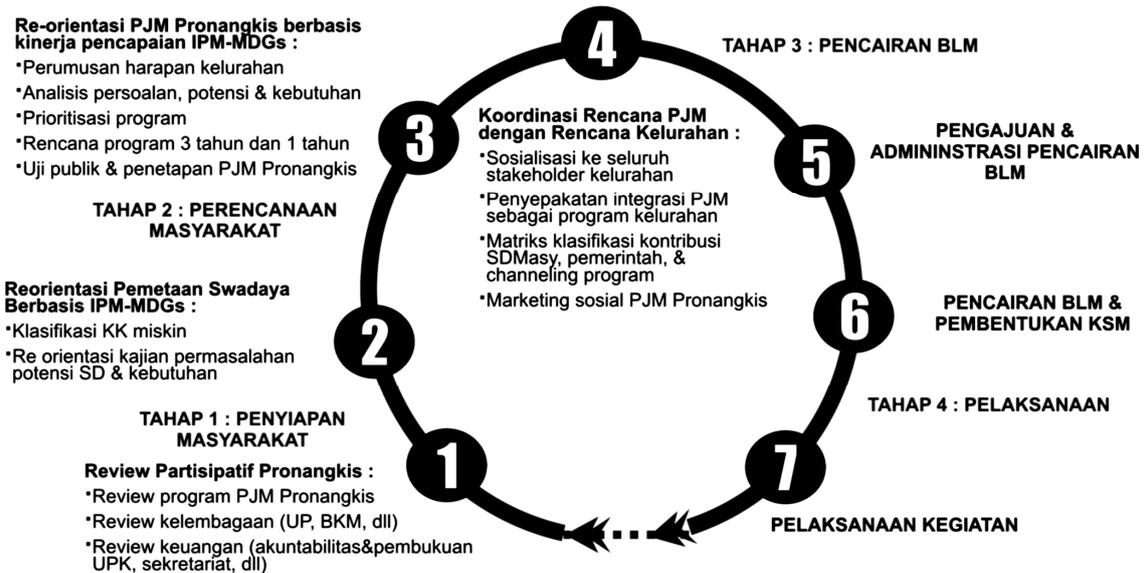
maka proses P2KP Sadang Serang masuk pada siklus kedua tahun 2004.



Gambar 3. Siklus untuk Lokasi Baru PNPM P2KP

Pada siklus II (untuk kelurahan yang sudah melaksanakan P2KP), proses yang dilakukan adalah seperti pada gambar IV.4. Pada tahapan ini, masyarakat melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam PjM Pronangkis selama satu tahun. Oleh karena itu kegiatannya adalah proses-proses review setiap

tahun untuk memonitor pelaksanaan apakah ada yang perlu direvisi. Pada siklus ini dilakukan kembali proses mengidentifikasi warga miskin (pemetaan swadaya), menyusun program usulan, pencairan BLM dan pelaksanaan program tridaya.



Gambar 4. Siklus untuk Lokasi Lama PNPM P2KP

### SIKLUS PARTISIPATIF SADANG SERANG

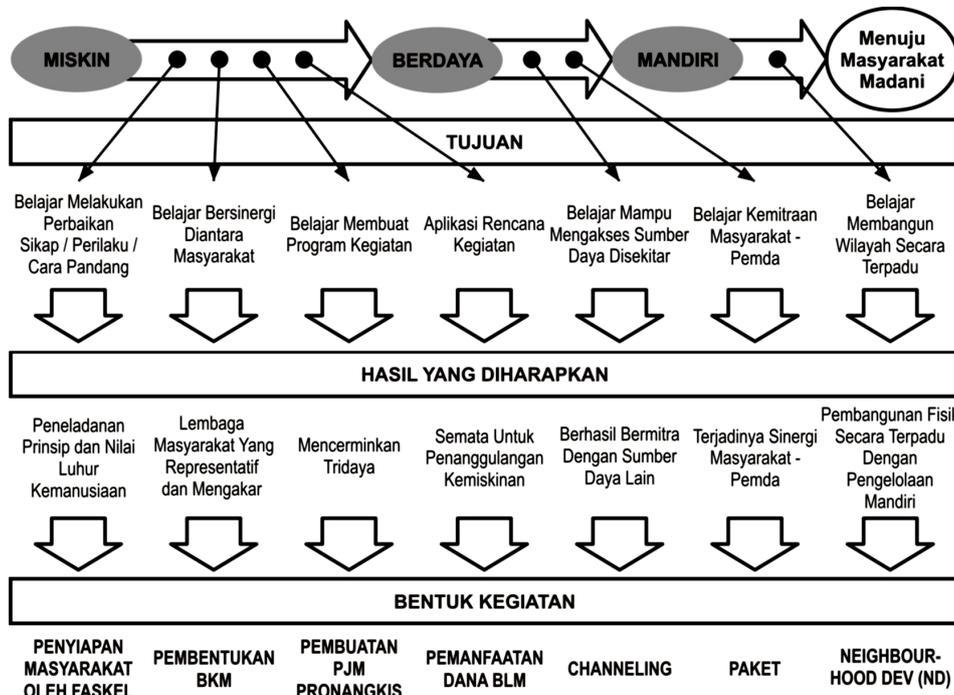
Pada awal prosesnya, PNPM P2KP (Gambar 3) mengajarkan pada masyarakat untuk mengenali akar masalah kemiskinannya melalui kegiatan Refleksi Kemiskinan (RK). Dalam kegiatan tersebut dihasilkan rumusan permasalahan kemiskinan dan daftar warga miskin yang disusun dalam suatu dokumen bernama Pemetaan Swadaya (PS). Rumusan tersebut akan menjadi dasar penyusunan PJM Pronangkis yang berisi program-program jangka menengah pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi masalah tadi.

Setelah masalah kemiskinan teridentifikasi, masyarakat menyusun program yang disusun berdasarkan kriteria kemiskinan dan masalah kemiskinan melalui rembug. Program yang sudah disepakati dilaksanakan dalam jangka waktu PJM yaitu 3 tahun dan direvisi setiap tahun untuk selanjutnya mendapatkan pembiayaan BLM. Sadang Serang mendapatkan bantuan BLM P2KP pertama kali tahun 2004. Pada awalnya (2004),

BLM yang dikucurkan adalah sebesar Rp 500.000.000,-, tahun kedua 2007 sebesar Rp 350.000.000,- dan tahun 2008 dalam proses pencairan tahap I yaitu Rp 105.000.000,-.

Siklus setelah BKM terbentuk, PJM Pronangkis tersusun, dan masyarakat memanfaatkan BLM, berbeda dengan siklus diatas. Siklus lanjutan untuk lokasi lama diberlakukan untuk Sadang Serang pada tahapan ini (Gambar 4) dan dilaksanakan sampai dengan sekarang. Pada tahapan ini selain mengakses BLM, masyarakat diajarkan untuk mengakses sumber daya lain diluar komunitas melalui kegiatan kemitraan.

Upaya bermitra ini adalah untuk mempersiapkan BKM sebagai BKM yang mandiri. Untuk itu BKM harus dapat mengakses dana PAKET (dana stimulus pemerintah pusat yang mensyaratkan APBD sebagai dana pendamping) dan dana kerjasama dengan pihak swasta (channeling). Secara detail bentuk kegiatan dalam PNPM P2KP adalah seperti pada gambar 5.



Gambar 5. Kegiatan dalam PNPM P2KP

Pada tahun 2008 BKM Sadang Serang berhasil mencapai BKM mandiri. Hal ini karena Sadang Serang sudah dapat bermitra dengan pihak lain. Pada tahun 2006 BKM mendapatkan dana PAKET dari pemerintah pusat sebesar Rp 37.000.000,- dan dana APBD sebesar Rp 58.000.000,- yang digunakan untuk program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) 5 unit dan pemberian beasiswa untuk 458 siswa.

## **RESPON MASYARAKAT TERHADAP METODE PNPM P2KP**

### **Aspek Kelembagaan**

BKM sebenarnya memiliki mekanisme untuk memobilisasi sumber daya yang dipunyai untuk meningkatkan kinerja sesuai tuntutan P2KP. Namun, pelaksanaannya tidak ditangani dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan, ada indikasi terbelenggu karena struktur organisasi tidak bekerja efektif sesuai tugasnya yang tertuang dalam anggaran dasar dan pedoman PNPM. SDM yang aktif tidak sebanding dengan tuntutan PNPM untuk kinerja BKM yang prosedural, rinci dan bersifat relawan.

BKM nampak belum berfokus pada penguatan sumber daya internal. Hal ini nampak dari minimnya sumber pembiayaan dari pihak swasta sehingga mengakibatkan potensi pembiayaan mandiri digantungkan dari dana swadaya.

Selain itu terkait dengan status kemandirian dari BKM Sadang Serang yang telah ditetapkan menjadi BKM mandiri pada tahun 2008 berdasarkan indikator kemandirian P2KP, ternyata tidak sesuai dengan realitanya menyebabkan masyarakat terbelenggu. Ife (1996:186) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan komunitas seperti ini

membutuhkan proses perubahan yang lama dan kontinyu karena menyentuh aspek dasar dari masyarakat yang sudah melekat selama bertahun-tahun.

Nampak ada ketidaksiapan BKM Sadang Serang dalam melakukan serangkaian prosedur PNPM. Terlebih lagi mereka sedang menangani program lanjutan sebagai wilayah pilot di Jawa Barat untuk menuju ke masyarakat 'madani' setelah melampaui tahap 'mandiri' yaitu *neighbourhood development* (ND). Ketidaksiapan ini dalam hal membagi jumlah SDM BKM yang terbatas untuk menangani manajemen kedua program besar itu yaitu PNPM dan ND. Status kemandirian yang disematkan kepada BKM Sadang Serang nampak sangat normatif dan belum terinternalisasi dalam manajemen. Kemampuan mobilisasi yang lemah menyebabkan mereka kewalahan.

### **Aspek Pembelajaran Masyarakat**

Proses pembelajaran masyarakat masih berlangsung namun nampak masyarakat merasa kerepotan dengan segala prosedur PNPM. Menurut narasumber fasilitator, hal yang menyulitkan adalah terjadinya masyarakat yang tidak peduli terhadap semua proses PNPM. Mereka merasa repot, menyita waktu dan tidak ada pendapatan dari bekerja sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai pelaksana lapangan. Masyarakat sebenarnya merasa program ini bermanfaat, namun prosedur yang normatif dan rinci membuat mereka kesulitan.

Konsep PNPM ini asing untuk mereka, jangka waktu 6 tahun sejak proses partisipasi dimulai 2003 ternyata belum cukup untuk memberikan edukasi secara mendasar.

Masyarakat dipaksa untuk mengikuti konsep PNPM yang seakan 'proyek' dimana setiap tahapan harus selesai pada akhir tahun anggaran. Dana harus segera terserap padahal masyarakat belum siap dengan persyaratan pencairan dana, dan akhirnya masyarakat dipaksa untuk menyelesaikan segalanya.

Seperti yang diungkapkan oleh Silas (2008) bahwa konsep partisipatif ini harus muncul dari masyarakat. Konsep yang pas dengan masyarakat belum tentu suatu yang rampung tapi terjamin dinamis agar kelak memenangkan peluang dan tantangan yang akan datang. Hal ini berlawanan dengan konsep PNPM yang serangkaiannya diatur dalam modul dan masyarakat menjalankan modul itu, dengan inti partisipatif dalam penentuan keputusan pelaksanaan, bukan pada bagaimana masyarakat menjalankan konsep dengan cara dan prosedur yang mereka sepakati.

### **Aspek Pelaksanaan Program**

Pada realisasi dana fisik, masyarakat sangat merasakan manfaatnya. Hal ini diakibatkan program fisik secara instan menyelesaikan permasalahan yang terjadi, misalnya pembangunan rumah tidak layak huni, perbaikan jalan, pembangunan sarana air bersih, dll. Melalui program fisik, PNPM P2KP memberikan manfaat yang nyata.

Pada pelaksanaan dana sosial, masyarakat melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya beasiswa bagi pelajar tidak mampu, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak-anak, bantuan untuk warga lansia (lanjut usia), dll. Respon dari masyarakat mengenai pelaksanaan dana sosial sama dengan dana fisik. Masyarakat menerima langsung bantuan dan merasakan manfaat dari

bantuan yang digulirkan. Permasalahan terjadi terkait dengan prosedur pembelian barang yang menurut warga terlampau panjang dan rumit. Hal ini wajar ketika cara-cara yang meminimalisir penyelewengan kurang dipahami masyarakat sebagai langkah transparansi.

Pada pelaksanaan perguliran dana ekonomi terdapat kecenderungan karakter masyarakat yang mampu mencicil. Masyarakat yang memiliki kemampuan mencicil, sebagian besar memiliki usaha yang sudah sekian lama digeluti sehingga dana bergulir BLM digunakan untuk menambah modal. Namun, tidak semua warga memiliki karakter demikian. Sebagian besar dari mereka belum memahami hakekat dana ini. Selain itu BKM tidak memberikan pembinaan untuk KSM ekonomi sehingga masyarakat ber-'usaha' sendiri.

Dari sisi KSM sebagai pelaksana kegiatan tridaya, terdapat kecenderungan kesulitan dalam mengikuti prosedur P2KP. Di satu sisi mereka memiliki semangat karena merasa program ini bermanfaat namun disisi lain mereka masih awam terhadap prosedur-prosedur pelaksanaan kegiatan. P2KP tidak memberikan masyarakat peluang untuk membuat prosedur yang mereka sepakati sendiri akibatnya banyak KSM yang menunda kelengkapan administrasi sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda.

### **Aspek Pengelolaan Dana**

Dana yang beredar dalam program P2KP adalah dana untuk kegiatan fisik, sosial dan dana bergulir. Dana kegiatan fisik dan sosial yang bersifat stimulan menyebabkan program tidak berjalan sesuai dengan volume yang dibutuhkan masyarakat. Secara teoritik, ini adalah strategi untuk menumbuhkan rasa

memiliki terhadap program dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan PNPM mensyaratkan minimal 30% dana swadaya dari total dana kegiatan. Namun nampaknya masyarakat belum memahami ini sebagai suatu hal yang harus dijadikan *way-of-life* untuk kelanjutan pendanaan program kemiskinan.

Dana bergulir masih dianggap oleh masyarakat sebagai dana hibah seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), sehingga tingkat kemacetan dana menjadi sangat tinggi. Berdasarkan data yang ada, dana bergulir ini justru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan usahanya.

Masyarakat miskin masih sangat awam terhadap prosedur administrasi mereka menganggap itu mempersulit, proses edukasi inilah yang seharusnya membimbing masyarakat miskin untuk sadar secara administratif atau paling tidak prosedurnya mereka sepakati. Akibatnya, apa yang dilakukan sebatas memenuhi persyaratan PNPM agar dana cair dan bukan menjalankan tahapan yang mereka yakini keuntungannya untuk mereka.

Ditambah dengan masalah klasik, konflik kepentingan muncul ketika ada sejumlah uang beredar didalamnya. Pihak yang menginginkan kejujuran justru tidak kuat menghadapi ketidakjujuran dalam pelaksanaannya, akhirnya pihak tersebut mengundurkan diri (mantan anggota BKM). Hal ini berpeluang negatif karena justru orang-orang dengan nilai pribadi luhur menjadi enggan mengambil resiko dan digantikan dengan orang-orang yang tidak semestinya.

## KESIMPULAN

Masyarakat pada dasarnya memiliki semangat dalam melaksanakan PNPM P2KP karena sisi manfaat pada warga miskin. Keterlibatan masyarakat juga dirasakan penting untuk realisasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, masyarakat belum terbiasa dengan tuntutan keaktifan yang tinggi. Ketiadaan pendapatan juga mengakibatkan keengganan selaku relawan secara aktif.

Kinerja kelembagaan BKM, KSM, penggunaan dana, sampai dengan pelaksanaan program membawa pada inti persoalan bahwa masyarakat belum siap dengan program ini. Akibatnya ketergantungan pada fasilitator menjadi tinggi dan keberlanjutan program ini secara mandiri menjadi sulit diprediksi.

Pada dasarnya kondisi-kondisi diatas tidak serta merta diakibatkan oleh kelemahan internal dari masyarakat Sadang Serang, namun juga ada kontribusi dari konsep P2KP yang tidak utuh dalam pelaksanaan partisipasinya.

Program partisipatif tidak dapat dilaksanakan dengan konsep proyek dengan serangkaian indikator yang sangat terukur. Program partisipatif dengan roh pemberdayaan memberikan masyarakat keleluasaan dalam memahami program. Jangka waktu yang dibutuhkan juga sangat tergantung dari masing-masing masyarakat. Generalisasi dalam metode dan jangka waktu sampai keberhasilan dicapai tidak dapat dilakukan secara *"textbook"*. Dinamika masyarakatlah yang menentukan hal tersebut terjadi. Metode yang diterapkan dalam proses edukasi masyarakat harus membuka keleluasaan masyarakat untuk mengolah sesuai dengan karakter mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bengen, D.G. (2001): Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. *Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat*. Bogor, 21-22 September 2001.
- Christenson & Robinson (1989): *Community Development in Perspective*, Iowa State University Press, Iowa.
- Cook, James B. (1994): *Community Development Theory*, Modul Pengajaran Department of Community Development University of Missouri. Missouri.
- DPU Ciptakarya. (2007): *Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP*
- Green, Gary Paul. (2002): *Asset Building and Community Development*, Sage Publications, Amerika Serikat
- Ife, J.W (1996): *Community Development : Creating Community Alternatives – vision, analysis and practice*, Addison Wesley Longman, Australia.
- Kretzmann, J, & McKnight, J. (1993): Building Communities from The Inside Out : A Path Toward Finding and Mobilizing a Community Development dalam *New York Times Magazine*.
- Mattessich, Paul, dkk. (2004): *Community Building : What Makes It Work*, Wilder Publishing Center, Minnesota.
- Mikkelsen, B. (1999); *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Turner J.F.C. (1976): *Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments*, Marion Boyars, London.
- URDI (2008): Keberlanjutan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Buku 1 Prosiding Seminar, Yogyakarta 25-26 Juli 2008.